

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Kebudayaan pada memiliki posisi penting dalam formasi sosial masyarakat, maka dalam setiap perkembangan sejarah masyarakat istilah kebudayaan atau budaya mengundang banyak diskusi dan polemik di kalangan elite negara, intelektual, bahkan sampai kepada kalangan budayawan atau seniman yang merasa memiliki andil besar dalam penetapan makna serta definisi kebudayaan. Diskusi atau debat mengenai kebudayaan selalu terjadi dalam periode sejarah Indonesia, dimulai dari *Polemik Kebudayaan* sekitar tahun 1930-an, konfrontasi kebudayaan dalam *Prahara Kebudayaan* ditahun 1950-an – 1960-an, dan kebudayaan dalam konteks pembangunan di Era Orde Baru 1966 - 1998.

Selain dari debat pandangan kebudayaan yang telah disebutkan di atas terdapat peristiwa penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang memiliki kontribusi dan implikasi besar dalam pembentukan desain kebudayaan Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan perkembangan dialektis dalam merumuskan gagasan kebudayaan hingga bentuk praksisnya dalam kebijakan dan strategi kebudayaan serta sebagai upaya intelektual dan kalangan pemerintah merumuskan kebudayaan dalam apa yang disebut dengan peristiwa Kongres Kebudayaan.

Kongres Kebudayaan adalah salah satu forum yang bersifat formal dalam membahas dinamika masyarakat Indonesia terutama dalam bidang kebudayaan. Kongres Kebudayaan merupakan upaya rekonsiliasi dari perdebatan kebudayaan yang terjadi dan sebagai cara membangun dialektika akan diskursus kebudayaan. Kongres Kebudayaan merupakan suatu peristiwa budaya yang amat penting maknanya, tidak hanya bagi kebudayaan kita yang beranekaragam (*multikultur*), tetapi juga bagi usaha memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa (*multi-etnik*).¹

Kongres Kebudayaan hadir dalam membahas berbagai masalah yang disepakati oleh panitia pelaksana atas rekomendasi beberapa kalangan intelektual dan budayawan, materi yang didiskusikan dapat menyangkut berbagai macam masalah, seperti masalah organisasi pemuda, partai politik, agama, perempuan, sosial, organisasi profesi dan organisasi lainnya. Dapat pula mengenai “masalah tertentu” saja, seperti: masalah – masalah kesenian, kebudayaan, bahasa, sejarah, pendidikan, kehutanan, agama, dan lain – lain.² Urgensi akan problem bangsa terkait kehidupan sosio – kultural masyarakat selalu menjadi perhatian dalam setiap kongres.

Menurut data yang berhasil dihimpun, Kongres Kebudayaan pertama diselenggarakan tahun 1918 di Surakarta. Setelah itu diikuti dengan kongres – kongres berikutnya, yaitu: Kongres Kebudayaan tahun 1919 di Surakarta, tahun

¹ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918 – 2003)*, (Jakarta: Ombak), 2007, hlm. 3.

² *Ibid.*

1924 di Yogyakarta, tahun 1926 di Surabaya, tahun 1929 di Surakarta, dan tahun 1937 di Bali. Setelah Indonesia merdeka, Kongres Kebudayaan diselenggarakan tahun 1948 di Magelang, kemudian disusul tahun-tahun: 1951 di Bandung, tahun 1954 di Surakarta, 1957 di Bali, 1960 di Bandung, 1991 di Jakarta dan yang baru saja dilaksanakan tahun 2003 di Bukittinggi.³

Sepanjang diadakannya Kongres Kebudayaan di Indonesia, salah satu Kongres Kebudayaan yang menarik banyak perhatian kalangan intelektual, budayawan dan masyarakat adalah peristiwa Kongres Kebudayaan pada tahun 1991 di Jakarta. Hal ini disebabkan sempat terhentinya pembahasan budaya dalam tingkat nasional selama 31 tahun. Semenjak Kongres Kebudayaan Tahun 1960 tidak diadakan kembali perdebatan wacana kebudayaan dan pembentukan kebijakan strategis dalam bidang kebudayaan, padahal melihat konteks sosial dan politik yang terjadi terutama kebijakan budaya yang diproduksi negara terkesan sentralistik dan represif beberapa kalangan menganggap penting diadakan sebuah Kongres Kebudayaan kembali dengan melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat.

Kongres Kebudayaan tahun 1991 diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober hingga 3 November di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, dengan menggunakan berbagai anjungan untuk sidang kelompok. Sidang pleno diselenggarakan di Sasono Langenbudhoyo. Sebagai efek dari pola pemerintahan

³ *Ibid*, hlm 5.

dan berbagai tindakannya yang represif dengan dalih menjaga stabilitas negara, banyak kalangan yang meragukan pelaksanaan kongres ini, muncul istilah – istilah sinis seperti; *kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongres pejabat pemerintah, kongres birokrasi, keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka, dan lain – lain.*⁴ Hal ini dirasa tidak mengherankan bila kita sepakat bahwa rezim Orde Baru memang memantapkan posisinya dengan menyelaraskan bahkan menyeragamkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat secara hegemonik dan represif untuk mendukung berbagai program yang diberlakukannya.

Tod Jones dalam bukunya *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi* (2015) pun menegaskan bahwa ada suatu kesinambungan berskala besar dalam kebijakan budaya pada seluruh masa Orde Baru. Suatu peristiwa yang menegaskan arah kebijakan budaya selama Orde Baru, sambil secara simultan menghubungkannya dengan zaman perjuangan kemerdekaan, adalah Kongres Kebudayaan IV pada tahun 1991. Kongres Kebudayaan IV tersebut bertema “Dari Seni hingga Pembangunan” dan, tidak mengherankan, tema itu menegaskan arah kebijakan budaya rezim Orde Baru dalam rekomendasinya meskipun terdapat pertentangan dari beberapa peserta.⁵ Menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana sebuah

⁴ *Ibid*, hlm, 214.

⁵ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2015, hlm 206.

proses historis dalam konteks kebudayaan Indonesia bersinggungan dengan kebutuhan atau agenda rezim yang berkuasa.

Hal ini menunjukkan pentingnya kajian historis dan sosiologis untuk mampu melihat sudut pandang lain dalam fenomena yang terjadi dalam perkembangan diskursus kebudayaan Indonesia. Relasi antara pelaksanaan kongres dengan kebutuhan politis rezim berkuasa sangat terasa bilamana memperhatikan setiap hasil keputusan dan pengukuhan kebijakan serta strategi kebudayaan yang akan direalisasikan. Karena dalam catatan sejarah tidak seluruh keputusan hasil kongres terkait saran dan rekomendasi untuk kebijakan dan strategi kebudayaan diimplementasikan oleh rezim berkuasa.

Sikap kritis dan skeptis akan setiap kebijakan dan strategi kebudayaan yang dirumuskan sangat penting terutama mengelaborasikannya dengan situasi sosial politik yang terjadi, hal ini penting dilakukan untuk menghasilkan diskursus kebudayaan yang memang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Dengan demikian Kongres Kebudayaan selain menjadi tradisi yang dipertahankan dalam sejarah kebudayaan Indonesia, dapat juga dilihat sebagai bentuk hubungan kausal antara kebutuhan politis rezim dengan perkembangan pandangan kebudayaan dalam masyarakat.

Secara sosiologis, Kongres Kebudayaan adalah upaya untuk melakukan produksi dan reproduksi kebudayaan termasuk gagasan, kebijakan, dan strategi yang dibangun dalam mengatasi problema dan kebutuhan kultural masyarakat. Analisis sosiologis terutama sosiologi kebudayaan sangat diperlukan untuk

akhirnya kembali memahami Kongres Kebudayaan dalam artian sebagai sebuah produk kebudayaan masyarakat. Aktivitas kultural dalam masyarakat tidak terlepas dari kehadiran ruang atau institusi yang memberikan akses bagi setiap masyarakat yang secara aktif melakukan produksi dan reproduksi kebudayaannya.

Penelitian ini akan melakukan kajian mengenai peristiwa sejarah Kongres Kebudayaan, secara spesifik adalah Kongres Kebudayaan tahun 1991. Pemilihan Kongres Kebudayaan tahun 1991 berdasar pada perkembangan pandangan kebudayaan yang melihat konteks sosial politik masyarakat – disaat rezim Orde Baru berkuasa – dengan memperhatikan juga kebutuhan agenda politik yang berimplikasi pada pelaksanaan kongres. Selain itu, peralihan penyelenggara dalam kongres dari institusi independen berubah menjadi negara yang memprakarsai kongres menjadi penting untuk diteliti karena akan berkaitan dengan proses pelaksanaan dan substansi dari Kongres Kebudayaan.

Sebagai upaya untuk menggambarkan dinamika perkembangan diskursus kebudayaan dan hubungannya dengan konteks sosial politik, penelitian ini secara khusus akan mengkaji teks – teks dalam bentuk makalah kebudayaan untuk mendapatkan gambaran dari beragamnya pandangan sebagai respon serta gagasan bagi kebudayaan Indonesia. Analisis secara sosiologis dan historis perlu dilakukan sebagai upaya memberikan kritik dan saran dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Kongres Kebudayaan sebagai salah satu bagian dari sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaan baik secara teknis hingga esensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan beragamnya interpretasi berbagai kalangan mulai dari elite negara, intelektual, bahkan seniman dan budayawan yang terlibat didalamnya. Kongres Kebudayaan tahun 1991 merupakan sebuah ruang perdebatan dalam diskursus budaya di Indonesia yang mewakili kondisi sosial politik dan perubahan dalam pola pemerintahan saat itu. Transisi dari periode sejarah kebudayaan yang menandai sebuah upaya membangun rekonsialisasi dan konsensus dalam merumuskan kebudayaan dalam kerangka politik kebudayaan yang menjadi agenda dari pembangunan sangat menarik untuk diteliti.

Dengan melihat bahwa adanya keterkaitan antara Kongres Kebudayaan dan aktivitas kultural dalam masyarakat sebagai pendorong dalam mendukung agenda pembangunan maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan kritik yang logis untuk melakukan pembaharuan yang sesuai dengan kondisi sosio – kultural masyarakat. Melalui makalah kebudayaan yang disampaikan dalam kongres kebudayaan akan dapat dilakukan penelitian tekstual maupun kontesktual untuk melihat kontestasi pandangan yang terjadi.

Merujuk pada teori sosiologi kebudayaan Raymond Williams yang melihat bahwa eksplorasi segala makna kebudayaan termasuk produksi dan reproduksinya bisa ditelaah dengan memperhatikan berbagai signifikasi budaya

dalam teks, institusi, formasi dan alat produksinya, disini memberikan landasan untuk akhirnya peneliti melakukan analisa terhadap Kongres Kebudayaan di Indonesia. Dari uraian diatas penelitian ini akan dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontestasi pandangan budaya dalam peristiwa Kongres Kebudayaan di Indonesia pada tahun 1991?
2. Bagaimana peristiwa Kongres Kebudayaan tahun 1991 ditinjau dalam perspektif sosiologi kebudayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar membahas peristiwa Kongres Kebudayaan di Indonesia khususnya pada tahun 1991 yang merupakan sebuah bagian tradisi yang aktif hingga saat ini dalam merumuskan kebijakan dan strategi kebudayaan dalam agenda pembangunan masyarakat. Sebagai titik analisis digunakan kerangka analisis sosiologi kebudayaan Raymond Williams yang bertujuan menggali berbagai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan kongres secara ilmiah. Dengan demikian, sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kontestasi pandangan budaya yang berkembang dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan pada tahun 1991 berkaitan dengan agenda pembangunan yang dirumuskan pada periode tersebut.

2. Menganalisa dan menjelaskan Kongres Kebudayaan di Indonesia pada tahun 1991 melalui teori sosiologi kebudayaan menurut Raymond Williams.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praksis dalam mengembangkan kajian akan sejarah kebudayaan Indonesia dalam perspektif sosiologi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca terutama mengenai peristiwa Kongres Kebudayaan dalam tinjauan sosiologi kebudayaan serta memberikan penjelasan dalam relasi diskursus kebudayaan dan agenda pembangunan melalui teks – teks yang mengandung struktur wacana, pesan, ideologi, dan makna. Dengan demikian, penelitian ini dibagi kedalam beberapa manfaat penelitian, sebagian berikut;

1. Untuk peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan terkait kajian sosiologi terutama untuk pembahasan peristiwa sejarah dan hubungannya dengan kepentingan politik negara.
2. Untuk pembaca, penelitian ini juga dilakukan sebagai acuan serta referensi bagi penelitian sejenis, sehingga dapat memperkaya dan memperbaharui kajian sosiologi kebudayaan dan sejarah kebudayaan di Indonesia.

3. Untuk pemerintah, penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan tema-tema pembahasan kongres yang lebih relevan terkait permasalahan kebudayaan dan penetapan kebijakan sekaligus strategi kebudayaan yang inklusif.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis ini dibuat untuk memetakan fokus penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dan menambah referensi sebagai wawasan baru dalam kajian sosiologi kebudayaan. Selain itu, tinjauan penelitian sejenis ini dijadikan acuan dalam membentuk kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis terkait tema dan topik penelitian. Dalam tinjauan penelitian sejenis ini juga peneliti mencoba melakukan kontekstualisasi dari pemikiran sosiologi kebudayaan menurut Raymond Williams yang menjadi dasar dalam melakukan analisis pada peristiwa Kongres Kebudayaan di Indonesia. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, dan juga artikel ilmiah terkait dengan peristiwa Kongres Kebudayaan, dinamika sejarah kebudayaan di Indonesia, maupun pemikiran sosiologi kebudayaan menurut Raymond Williams.

Tinjauan penelitian sejenis yang pertama adalah Jurnal Nasional yang ditulis oleh Serly Nur Hidayah Ferdianah dengan judul *Peranan Mangkunegara VII dalam Mengembangkan Kebudayaan Jawa 1918 – 1942* (2017).⁶ Penelitian

⁶ Serly Nur Hidayah Ferdianah, *Peranan Mangkunegara VII Dalam Mengembangkan Kebudayaan Jawa 1918 – 1942*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 2, (Surabaya: Universitas

dalam jurnal ini secara garis besar bertujuan untuk menjelaskan peranan Mangkunegara VII sebagai penerus kerajaan Mataram Islam dalam mengembangkan dan menjaga eksistensi kebudayaan Jawa yang harus berhadapan dan berkontestasi dengan nilai – nilai kebudayaan Barat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah dengan empat tahap, antara lain tahap pertama heuristik, yang merupakan tahapan untuk mengumpulkan sumber; tahap kedua kritik, tahap kritik menggunakan kritik interen dengan melakukan kritik terhadap isi sumber; ketiga tahap intepretasi, tahap melakukan perangkaian terhadap fakta yang ada berdasarkan intepretasi dalam memahami data sejarah yang telah melalui proses kritik sebelumnya; keempat historiografi, setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini peneliti melakukan penulisan terhadap sejarah.⁷

Terdapat dua faktor dasar mengenai peranan B.R.M Soerjo Soeparto atau Mangkunegara VII mengembangkan kebudayaan Jawa, faktor tersebut yakni yang berasal dari dalam dan berasal dari luar diri B.R.M Soerjo Soeparto. Adapun faktor dasar B.R.M Soerjo Soeparto untuk mengembangkan kebudayaan Jawa yang berasal dari dalam diri B.R.M Soerjo Soeparto, yakni kenyataan bahwa Ia merupakan penerus kerajaan Mataram yang harus melestarikan kebudayaan Jawa.

Negeri Surabaya), Juli 2017. Diakses melalui laman <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18929> pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 15. 22 WIB.

⁷ *Ibid*, hlm 309.

Peranan Mangkunegara VII dalam pengembangan kebudayaan khususnya kebudayaan Jawa memberikan pemahaman bahwa peran elite atau kalangan terdidik akan kebudayaan sudah meresap sedari dulu, menandai sekali lagi kebudayaan sebagai diskursus utama dalam kehidupan manusia. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini menunjukkan Mangkunegara VII dalam upaya pengembangan kebudayaan Jawa terbagi kedalam 3 bagian, yaitu: *pertama*, peranan dalam bahasa Jawa; *kedua*, peranan dalam Kongres Kebudayaan tahun 1918, dan *ketiga*, peranan dalam *Java Instituut*.⁸

Tinjauan penelitian sejenis yang kedua adalah Jurnal Nasional yang ditulis oleh tiga orang yaitu, Hersry Setiawan, FX Domini BB Hera, dan Irawan, dengan judul *Kritik dan Refleksi Kebudayaan Nasional: Dulu, Kini, Hendak Serta Kemana?*⁹. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Kebudayaan nasional adalah konsep yang sulit dipahami dan didefinisikan. Proses pencarian definisi dan penjelasan itu tidak pernah mencapai penjelasan yang stabil. Namun kebanyakan orang memiliki masalah tentang konsep tersebut, kekuatan kebudayaan nasional adalah wujud sosial untuk melawan banyak tantangan dari masyarakat.¹⁰

Tulisan ini menyoroti 4 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam uraiannya, meliputi tonggak-tonggak polemik kebudayaan nasional; pergumulan

⁸ *Ibid*, hlm 322 – 323.

⁹ F. X. Domini B. B. Hera, Hersri Setiawan, dan Irawan. *Kritik dan Refleksi Kebudayaan Nasional: Dulu, Kini, Hendak Serta Kemana?*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, (Malang: Universitas Negeri Malang), Agustus 2011. Diakses melalui laman <http://fis.um.ac.id/kritik-dan-refleksi-kebudayaan-nasional-dulu-kini-serta-hendak-ke-mana/> pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 19.29 WIB.

¹⁰ *Ibid*, hlm 73.

dua unsur pembentuk kebudayaan nasional yang menonjol yakni studi kasus Jawa dan Minang; kebudayaan nasional sebagai cerminan mentalitas bangsa Indonesia; tantangan kebudayaan nasional dalam era globalisasi, yang terancam dari kebudayaan komunal menjadi kebudayaan komersil. Setidaknya dengan empat hal di atas, gelap-samarnya kebudayaan nasional Indonesia dapat menjadi lebih terang dan berguna bagi pembangunan manusia dan negara Indonesia.

Kebudayaan ialah “hasil keseluruhan daya-upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin” – begitulah kira-kira Ki Hajar Dewantara dalam prasaran yang dikemukakannya di depan Musyawarah Kebudayaan Nasional I di Magelang tahun 1948. Sedikit tentang musyawarah tersebut. Istilah Musyawarah Kebudayaan Nasional ini disebut pula dengan Kongres Kebudayaan (KK) diantaranya 1948 ini. Dalam KK tersebut pada intinya memperhatikan dua hal: *Pertama*, bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya dapat maju cepat dan *Kedua*, bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai terus bersifat kebudayaan jajahan, akan tetapi supaya menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir *cultureel imperialisme*. Gagasan untuk menyelenggarakan KK yang sangat strategis ini kemudian diambil alih oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.¹¹

¹¹ *Ibid*, Hlm 76.

Kongres Kebudayaan setelah Indonesia merdeka untuk pertama kali adalah tahun 1948 tersebut dan bersambung lagi pada tahun-tahun 1951, 1954, 1957, 1960, dan berlanjut 1991 dan 2003 setelah berhenti sekian lamanya.¹² Kebudayaan nasional merupakan modal sekaligus investasi yang berprospek cerah, khususnya dalam hal integrasi Indonesia. Meskipun pada perkembangannya, pada masa orde lama slogan 'jati diri bangsa' dan di era orde baru muncul istilah 'kepribadian nasional', tentu tidak mengurangi substansi kepribadian nasional yang secara hegemonik hendak disetir penguasa.

Tinjauan penelitian sejenis yang ketiga adalah buku yang berjudul *Kongres Kebudayaan (1918 – 2003)*¹³ karya Nunus Supardi. Buku ini berisi rekaman data dan sekilas tinjauan tentang kongres kebudayaan di Indonesia yang diselenggarakan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Disamping itu juga dijelaskan sekilas uraian tentang penyelenggaraan kongres – kongres: bahasa (Indonesia dan daerah), sejarah, kesenian, sebagai bagian dari kebudayaan. Kongres – kongres itu merupakan bagian penting dari upaya memajukan kebudayaan bangsa. Tujuan dalam penulisan buku ini adalah untuk mengangkat dan memperkenalkan peristiwa budaya yang selama ini terkunci rapat itu, agar peristiwa budaya itu dapat dijadikan bahan renungan dan memperluas wawasan. Disamping itu juga bertujuan agar peristiwa itu dapat diakui sebagai peristiwa budaya yang bersejarah.

¹² *Ibid*, Hlm 77.

¹³ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918 – 2003)*, (Jakarta: Ombak), 2007.

Secara umum kata “*congress*” berarti berarti *a meeting*, suatu pertemuan. Dalam kaitan dengan judul buku ini, makna kata “kongres” pada dasarnya adalah sebuah pertemuan formal para wakil dari berbagai organisasi (*a formal assembly of representative, as from various*). Tujuan pertemuan adalah untuk membahas masalah – masalah (*to discuss problems*) yang dipandang penting, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai cara untuk mengatasinya. Penjelasan hampir sama dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI kata “kongres” mengandung makna: “(rangkaiian) pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah”.¹⁴ Masih dalam kaitan dengan makna kata “kongres”, hasil kongres merupakan bagian yang terpenting. Hasil kongres dapat berbentuk keputusan, kesimpulan, rumusan, saran, usul, dan rekomendasi kongres. Peserta kongres memiliki kewenangan yang tinggi dalam memberikan pendapat dan memutuskan hasil – hasilnya.

Sebagai awal dari serangkaian kongres – kongres kebudayaan, cakupan masalah yang dibahas dalam Kongres Kebudayaan pertama tahun 1918 masih terbatas pada kebudayaan Jawa. Pada kongres – kongres selanjutnya wilayah budaya yang diperbincangkan semakin meluas, termasuk kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Tetapi dalam perdebatan cakupan masalah semakin meluas menjangkau kebudayaan bangsa atau kebudayaan Indonesia. Kongres

¹⁴ *Ibid*, hlm 2.

Kebudayaan tahun 1918 memiliki hubungan erat dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa. Keberadaan kongres tersebut tepat berada dalam dua peristiwa penting, yaitu lahirnya organisasi Boedi Oetomo (1908) dan Ikrar Sumpah Pemuda (1928). Buah dari perbincangan mereka mampu membulatkan kesepakatan untuk menjadikan “budaya bangsa” sebagai landasan membangun bangsa.

Setelah merdeka Kongres Kebudayaan diadakan kembali pada tahun 1948, yang digagas oleh kelompok budayawan, seniman, cendekiawan yang sebagian terlibat dalam kongres kebudayaan sebelum Indonesia merdeka. Kongres ini memiliki arti penting bagi bangsa dan sejarah kebudayaan Indonesia, karena menjadi peletak dasar mengenai konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada kongres tahun 1951 kembali diadakan dan dipelopori oleh lembaga kebudayaan diluar pemerintah yang disebut Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), sedangkan pada Kongres tahun 1954, 1957, dan 1960 Kongres Kebudayaan dicetuskan dan dilaksanakan dalam naungan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) yang unik dari BMKN adalah merupakan wadah bagi berbagai lembaga kebudayaan yang didirikan oleh berbagai kelompok atau partai berlandaskan ideologi yang ada pada saat itu. Sedangkan pemerintah dilihat pasif dan hanya menjadi fasilitator.

Pasca peristiwa G30S tahun 1965, BMKN mengalami kemunduran dan perlahan membubarkan diri. Berbagai lembaga kebudayaan yang awalnya sering membahas mengenai gagasan kebudayaan dan bentuk praksisnya tidak tampil

pasca kontestasi politik ideologi itu terjadi. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan lagi pada tahun 1991 setelah mengalami kekosongan selama 31 tahun akhirnya diskusi kebudayaan dalam bentuk sebuah forum dilakukan kembali. Pemegang dan penggagas kongres akhirnya bergeser dari lembaga kebudayaan di masyarakat ke lembaga milik pemerintah.

Tinjauan penelitian sejenis selanjutnya adalah Jurnal Nasional yang merupakan penyempurnaan dari makalah yang pernah disampaikan pada Kongres Kebudayaan V 2003 di Bukittinggi, 19 - 22 September 2003 ditulis oleh Taufik Abdullah dengan judul *Negara, Bangsa Dan Masyarakat Dalam Pendekatan Kebudayaan*.¹⁵ Dalam jurnal ini diulas secara kritis bagaimana pendekatan kebudayaan digunakan untuk memahami setiap wacana atau konsep – konsep yang berkembang dalam masyarakat. Tulisan ini mengambil konteks pada periode Orde Baru dengan melihat segala aktivitas politis yang dibangunnya dan intervensinya ke segala aspek kehidupan masyarakat melalui wacana kebudayaan.

Salah satu hal yang menarik dari Kongres Kebudayaan 1991, yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, ialah betapa beragamnya pemahaman dan pengertian tentang “kebudayaan”. Sudut kajian ilmiah

¹⁵ Taufik Abdullah, *Negara, Bangsa Dan Masyarakat Dalam Pendekatan Kebudayaan*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 6 No. 1, (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2004. Diakses melalui laman <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/about> pada tanggal 24 Juli 2018 Pukul 23.06 WIB

keragaman selalu menarik karena keragaman ini bisa mempertajam pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Tetapi tidak pula kurang menariknya ialah keragaman pemahaman tentang kebudayaan memungkinkan kita untuk mendapatkan semacam peta pemikiran tentang kebudayaan dikalangan para budayawan, ilmuwan dan pemikir.¹⁶ Jika saja hanya satu saja hal yang paling menonjol dari Orde Baru dalam sejarah pemikiran kontemporer Indonesia maka yang satu itu ialah usahanya untuk “menyamakan persepsi” dalam segala hal. Bukankah untuk keperluan ini Orde Baru merasa perlu memperkenalkan konsep “azas tunggal”, melaksanakan P4, dan mendirikan badan yang khusus menangani pelaksanaan P4 ini, dari tingkat pusat sampai kabupaten. Namun begitu, keragaman rupanya tak terelakkan juga.¹⁷

Wacana yang melihat dan memahami negara dari perspektif kultural inilah yang membawa kita untuk berkenalan dengan semboyan-semboyan seperti “persatuan dan kesatuan”, “warisan nenek moyang kita yang luhur”, dan tentu saja “kepribadian nasional” dan “jati diri bangsa” dan sebagainya. Berdasarkan semboyan yang sesungguhnya ahistoris ini pulalah sistem dan perilaku politik negara dijalankan. Maka dalam proses pemikiran selanjutnya kita pun telah menyamaratakan atau lebih tepat, memberi makna yang sama terhadap konsep-konsep “bangsa”, “masyarakat”, dan “negara”. Maka begitulah, bukan saja keragaman sejarah dan kebudayaan ditiadakan secara konseptual, kita pun

¹⁶ *Ibid*, hlm 1.

¹⁷ *Ibid*.

membenarkan dengan begitu saja sistem pemerintahan yang secara konseptual, kita pun membenarkan dengan begitu saja sistem pemerintahan yang sangat sentralisitis dan pemaksaan keseragaman tatanan sosial.

Tinjauan penelitian yang keempat lebih dititikberatkan pada kerangka sosiologi kebudayaan Raymond Williams sebagai pisau analisis untuk membantu memahami bagaimana sebuah produk kebudayaan yang ada dalam masyarakat mempengaruhi kondisi struktur yang ada melalui berbagai bentuk materialnya. Jurnal Internasional yang berjudul *Raymond Williams and the Structure of Feeling of Reality TV* yang ditulis oleh Beverley Best (2012)¹⁸ menjadi rujukan karena cukup memberikan gambaran pemikiran Williams dan kontekstualisasinya dalam bidang Sosiologi Kebudayaan. Williams dalam abstraksi analisisnya, disini akan mencoba untuk menunjukkan beberapa dinamika pendekatan sosiologi budaya melalui artikulasi fenomena budaya kontemporer yaitu Realita TV.

Bagi Williams, semua perkembangan dalam bentuk budaya (termasuk Realita TV) mengungkapkan, pada saat bersamaan, perkembangan praktik sosial lebih umum. Williams menyatakan, “mereka [bentuk budaya] harus dilihat...dalam diri mereka sendiri [seperti] proses sosial yang menyamar.

¹⁸ Beverley Best, *Raymond Williams and Structure of Feelings of Reality TV*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 7, (Canada, Montreal, QC: Department of Sociology and Anthropology Concordia University), April 2012. Diakses melalui laman http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_7_April_2012/21.pdf pada tanggal April 13 April 2018 pukul 11.21 WIB.

Semuanya kemudian bisa mendapatkan pengakuan serius mereka sebagai proses sosial; apalagi sebagai proses sosial dengan jenis yang sangat signifikan dan berharga”.¹⁹ Bagi Williams, perubahan bentuk budaya tentu merupakan konsekuensi transformasi sosial yang lebih luas. Sehubungan dengan hubungan antara bentuk budaya dan proses sosial yang lebih luas, bagi Williams, sosiologi budaya mengharuskan kita untuk tidak beristirahat dengan nyaman, dengan terlalu banyak kepastian, pada kekuatan penentu baik struktur sosial atau keadaan manusia yang disengaja. Bagi Williams, sejarah dan masyarakat terus “dalam proses”; tindakan-tindakan saat ini dimasa lalu sejumlah dengan informasi aktif saat ini.

Tinjauan penelitian selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh David C. Robinson dengan judul *Culture And Materialism: Raymond Williams And The Marxist Debate* (1991).²⁰ Tesis ini merupakan studi pemikiran Raymond Williams dalam sosiologi kebudayaan. Ini mencoba untuk secara kritis menginterogasi dan menilai teori Williams tentang “materialisme kultural”. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa pemikiran Williams, meskipun tidak bermasalah, merepresentasikan rekonstruksi yang signifikan dari teori Marxis.

Fokus dari studi ini meliputi: menelusuri silsilah Marxis yang bermasalah.

Sebuah analisis dari intervensi Williams ke dalam perdebatan materialis Marxis,

¹⁹ *Ibid*, hlm 192.

²⁰ David C. Robinson, Thesis: *Culture And Materialism: Raymond Williams And The Marxist Debate*, (British Columbia, Canada: Simon Fraser University), 1991. Diakses melalui laman summit.sfu.ca/system/files/iritems1/3546/b14095750.pdf pada tanggal 16 April 2018 pukul 13.23 WIB.

diskusi yang panjang tentang teori budaya Marxis dan hubungan Williams dengan isu-isu yang diangkat dalam literatur, perkembangan, sebagai perluasan wawasan yang diperoleh dari materialisme kultural, dari teori kritis budaya yang mencoba untuk berteori suatu bentuk budaya tertentu-sinema drama kejahatan perkotaan pada tahun 1970-an- sejalan dengan kondisi sejarah aktual dari produksinya.

Gagasan Williams tentang materialisme kultural, oleh karena itu, menunjukkan bahwa budaya tidak dapat dipisahkan dari proses material sosial tetapi harus dilihat sebagai bagian dari proses itu sendiri. Teori-teori materialisme kultural adalah, di atas segalanya, sebuah teori terpadu yang mencoba mengintegrasikan kategori-kategori seperti subjektivisme dan objektivisme melalui penekanan pada sifat praktek-praktek budaya yang “hidup” dan konstitutif. Williams mengambil dari para pemikir ini suatu pemahaman budaya sebagai suatu cara hidup yang utuh. Budaya tidak lagi dilihat hanya sebagai sastra, lukisan, patung, dan musik klasik --- semua yang disebut seni “halus” --- tetapi mewujudkan lebih banyak pengalaman dan praktik daripada ini. Bagi Williams, konsep “struktur perasaan” berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian untuk “keseluruhan cara hidup”.²¹

²¹ *Ibid*, hlm 82.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Sejenis

No	Nama Peneliti	Jenis Pustaka	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Serly Nur Hidayah (2017)	Jurnal Nasional: Peranan Mangkunegara VII dalam Mengembangkan Kebudayaan Jawa 1918 – 1942 (Studi Pustaka dan Pendekatan Historis)	Jurnal yang fokus dalam memberikan penjelasan mengenai peranan Mangkunegara VII dalam upaya pengembangan kebudayaan Jawa dan pengaruhnya dalam Kongres Kebudayaan 1918	Penjelasan mengenai sejarah Kongres Kebudayaan yang digagas oleh Mangkunegaran VII dan melihat posisi sentral kebudayaan dalam upaya pembangunan masyarakat terutama orang Jawa.	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran satu tokoh dan tidak memberikan analisa sosiologis mengenai kondisi masyarakat, lebih dititikberatkan pada penjelasan historis
2	F. X. Domini B. B. Hera, Hersri Setiawan, dan Irawan (2011)	Jurnal Nasional: Kritik Dan Refleksi Kebudayaan Nasional: Dulu, Kini, Serta Hendak Ke Mana? (Studi Pustaka)	Jurnal ini menggambarkan bahwa kebudayaan dan kesadaran akan makna kebudayaan nasional merupakan hasil sintesa dari produk sejarah dalam pergulatan wacana kebudayaan.	Penjelasan mengenai posisi kebudayaan dalam masyarakat dengan melihat dinamika perdebatan wacana nya di sejarah bangsa Indonesia, termasuk Kongres Kebudayaan.	Sistematika penulisan tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai sejarah kebudayaan hanya mengambil beberapa bagian saja.
3	Nunus Supardi (2007)	Buku: Kongres Kebudayaan (1918 – 2003) (Studi Pustaka dan Pendekatan Historis)	Buku ini fokus kepada upaya memberikan pengetahuan akan peristiwa sejarah kebudayaan yaitu, Kongres Kebudayaan dan dinamika pelaksanaannya.	Penjelasan mengenai sejarah Kongres Kebudayaan di Indonesia dan melihat hubungan pelaksanaannya dengan pembangunan masyarakat.	Penjelasannya lebih naratif akan sejarah Kongres Kebudayaan, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada analisa secara sosiologis.
4	Kasiyan (2003)	Jurnal Nasional: Revitalisasi Dialetika Pluralitas Budaya Global Dalam Perspektif Poskolonial (Studi Pustaka)	Jurnal ini memberikan beberapa tinjauan kritis mengenai dialetika kebudayaan yang membentuk suatu pemaknaan mengenai wacana kebudayaan.	Mengkaji secara kritis mengenai diskursus atau wacana kebudayaan yang berkembang dan melihat relasinya dengan pemaknaan dalam bentuk praksis dalam masyarakat	Perspektif yang digunakan sebagai kerangka analisis dan alternatif pembahasan adalah perspektif poskolonial sedangkan dalam penelitian ini digunakan

					perspektif sosiologi kebudayaan.
5	Taufik Abdullah (2004)	Jurnal Nasional: Negara, Bangsa dan Masyarakat Dalam Pendekatan Kebudayaan. (Studi Pustaka)	Jurnal ini melakukan analisis mengenai relasi dalam setiap perdebatan kebudayaan yang membentuk suatu wacana dan konsep – konsep lain dalam pemaknaan dan kesadaran individu dan masyarakat.	Konteks kajian serupa dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada saat periode rezim Orde Baru. Dilain sisi, dalam jurnal ini dan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dalam melihat kebudayaan sebagai wacana sekaligus aspek yang berhubungan dengan kondisi politik dan program pembangunan yang berlaku.	Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini lebih kepada tinjauan sosiologis, sedangkan dalam jurnal tersebut lebih kepada pendekatan kebudayaan.
6	Beverley Best (2012)	Jurnal Internasional: Raymond Williams and the Structure of Feeling of Reality TV (Studi Pustaka)	Jurnal Internasional yang membahas tentang kerangka berpikir Raymond Williams dalam menganalisa realita TV dari sudut pandang sosiologi dan historis.	Menggunakan pemikiran Raymond Williams dalam menganalisis produk kebudayaan dalam masyarakat melalui analisis sosiologis dan historis	Penelitian tersebut tidak melihat relasinya dengan konteks pembangunan masyarakat dan hubungan negara dalam membentuk kebijakan atas produk kebudayaan tersebut.
7	David C. Robinson (1991)	Tesis: Culture and Materialism: Raymond Williams and The Marxist Debate (Deskriptif Kualitatif dan Studi Pustaka)	Tesis yang membahas tentang pemikiran Raymond Williams dalam teori kritis budaya pada sinema drama kejahatan perkotaan pada tahun 1970 sejalan dengan kondisi sejarah aktual dari produksinya.	Menggunakan Pemikiran Raymond Williams dalam mengkritisi perkembangan suatu produk kebudayaan dengan memperhatikan aspek sosiologis dan historisnya.	Perbedaan pada objek penelitian dan pendekatan yang digunakan tersebut menggunakan analisis semiotika.

Sumber: Diolah dari tinjauan penelitian sejenis, 2018.

Pada tabel diatas peneliti menguraikan perbandingan dan persamaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan karakteristik yang spesifik dalam penelitian ini. Dengan melihat metode dan hasil yang dilakukan pada penelitian sebelumnya didapatkan beberapa pengetahuan yang dapat digunakan dalam membangun argumentasi dan kerangka berpikir.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Definisi Budaya Secara Umum

Dalam KBBI dijelaskan bahwa istilah ‘budaya’ sebagai *pertama*, pikiran; akal budi; hasil budaya; *kedua*, adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya; *ketiga*, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab dan maju): jiwa yang budaya; sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah”. Sedangkan istilah ‘kebudayaan’ dijelaskan sebagai “hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; antar keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya”²².

Definisi mengenai kebudayaan bisa ditinjau dari berbagai perspektif yang menandai bahwa diskursus akan budaya bisa digunakan dalam menganalisa atau memahami beragam peristiwa atau fenomena dalam

²² Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 169–170.

masyarakat. Perbedaan akan definisi berkaitan dengan logika berpikir dan lingkup dari kajiannya. Dalam ilmu humaniora, kultur atau budaya berarti pola kelakuan yang diturunkan secara sosial melalui pergaulan sosial (sosialisasi atau enkulturasi), bukan pola kelakuan yang diturunkan secara biologis. Seperti diketahui, sebagian besar kelakuan manusia ketika berhubungan dengan orang lain dipandang sebagai hal yang diturunkan secara sosial, sedangkan sebagian besar kelakuan binatang diturunkan secara biologis, atau instingtif.²³

Secara umum definisi budaya yang berkembang di Indonesia berasal dari kata dalam bahasa sansekerta, yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal, pandangan, atau maksud. Namun, menurut Bakker, kata budaya sebenarnya hanya berarti “beberapa akal”, dan sama sekali tidak ada pertautan pengertian dengan *term* kebudayaan.²⁴ Kesulitan memastikan asal usul secara linguistik dalam definisi budaya ini mengantar pada perdebatan gagasan yang akan digunakan untuk menjelaskan kondisi keseharian dalam kehidupan manusia.

²³ Amri Marzali, *Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*. Jurnal Humaniora, Volume 26 No 3, (Kuala Lumpur: University of Malaya), 2014, hlm 256. Dikutip dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/12047-ID-memajukan-kebudayaan-nasional-indonesia.pdf> pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 22.44 WIB.

²⁴ Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius), 2002, hlm 200.

Bakker mencoba untuk memberikan definisi akan *term* budaya meskipun tetap dalam bahasa sansekerta, Ia kemudian menyarankan bahwa kemungkinan besar kata budaya berasal dari kata *abbyudha* dalam bahasa sansekerta. Kata ini dalam bahasa aslinya mengandung pengertian “hasil baik, kemakmuran yang serba lengkap”.²⁵ Pandangan yang berpijak dalam definisi ini menjadikan sebuah arus pemahaman dominan kebudayaan yang fokus kepada nilai – nilai yang ideal atau kesempurnaan.

Ignas Kleden membagi tiga kelompok yang mewakili pengertian khas kebudayaan yaitu, para eksekutif pemerintah atau politisi, ilmuwan sosial, serta seniman dan budayawan.²⁶ Ketiga kelompok ini memiliki pandangan yang beragam sesuai dengan kebutuhan sosial dan politisnya. Secara umum kebudayaan atau budaya dimengerti dalam dua sifat yang memiliki perbedaan akan tujuan dari pengembangannya. *Pertama*, budaya sebagai kata benda, logika yang sering digunakan oleh elite pemerintah atau politisi yang mengartikan kebudayaan sebagai sesuatu yang ada di masa lalu atau sering disebut sebagai “warisan”. Dan dalam pengertiannya bagi kalangan ilmuwan sosial dipandang sebagai sesuatu yang terjadi pada saat ini, dalam artian sebagai bentuk “kehidupan budaya dan perubahan budaya”. *Kedua*, budaya sebagai kata kerja, logika yang digunakan oleh kalangan seniman atau budayawan, yang memandang bahwa kebudayaan

²⁵ *Ibid*, hlm 201.

²⁶ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES), 1987, hlm 155.

adalah proses kerja atau daya cipta untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia.²⁷

Perbedaan dalam melihat sifat kebudayaan ini membuat berbagai implementasi dan praksis dalam menanggapi, melalui cara pandang seperti ini kebudayaan menjadi sebuah proses yang terus menerus, tidak berhenti sebagai gejala kefaktan sosial yang dibekukan untuk kepentingan analisis ilmuwan sosial, bukan pula realitas sosial yang dijadikan objek kontrol sosial oleh para politisi, melainkan sebagai kerja yang tak pernah selesai.²⁸

1.6.2 Kontestasi

Kontestasi berhubungan dengan apa yang disebut dengan representasi. Representasi adalah kenyataan dari hasil akumulasi kondisi material dan relasi kuasa yang terjadi didalam masyarakat. Identitas, politik, ideologi, dan bahkan budaya merupakan manifestasi dari bentuk-bentuk representasi yang terjadi dari relasi dalam komunitas masyarakat. Menurut Ching-Yu Lin dan John McSweeney, representasi berkaitan dengan media dan kapital yang terjadi dalam sistem kapitalisme tahap akhir, sebagai konsekuensi dari relasi yang terjadi individu dan komunitas masyarakat merupakan cerminan dari “dunia yang terwakili”.²⁹

²⁷ Hikmat Budiman, *Op.cit*, hlm 176.

²⁸ *Ibid*, hlm 203.

²⁹ Ching-Yu Lin dan John McSweeney, *Representation and Contestation: Cultural Politics in A Political Century*, (Amsterdam: Rodopi B.V), 2010, hlm VIII.

Representasi memungkinkan adanya harapan baru dan makna baru yang hadir dalam komunitas masyarakat. Di lain sisi, representasi juga memungkinkan adanya kelompok dan subjek yang tidak “terwakili” oleh kondisi sosial masyarakat dan dinamika politik ideologi. Kontestasi merupakan konsekuensi dari adanya kelompok–kelompok dan subjek yang tidak “terwakili” dalam hubungan politik dan budaya. Ching-Yu Lin dan John McSweeney juga menjelaskan bahwa dasar dari kontestasi adalah dinamika dalam kekuatan dan ideologi ekonomi politik yang terus diperebutkan. Dalam kutipan berikut diuraikan secara jelas;

“In this context, culture, and especially spaces of representation within culture remain, fundamentally, sites of contestation - emerging, dynamic sites from which economic and political powers and ideologies can and must be contested, and ethical practices, norms and methodologies articulated; sites, no less, however, upon which power and ideology contest, constrain and delimit the space of such cultural performances.”³⁰

Kontestasi dapat diartikulasikan kedalam Bahasa dan praktik sosial.

Pada dasarnya adalah aktivitas sosial yang tergantung pada lingkungan tertentu dan kode diskursif yang mempengaruhinya. Menurut Antje Wiener

kontestasi dapat dipahami sebagai berikut;

“In this context, culture, and especially spaces of representation within culture remain, fundamentally, sites of contestation - emerging, dynamic sites from which economic and political powers and ideologies can and must be contested, and ethical practices, norms and methodologies articulated; sites, no less, however, upon which power and ideology contest, constrain and delimit the space of such cultural performances.”³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Antje Wiener juga menjelaskan bahwa ada empat mode kontestasi yang bisa diamati, yaitu arbitrase, deliberasi, perdebatan, dan justifikasi. Dari keempat elemen ini, kontestasi dapat membentuk hubungan yang berbeda diantara lingkungan sosial yang terjadi. Ia menjelaskan seperti dalam kutipan berikut;

“As indicated with reference to four modes of contestation above, the concept of contestation has been used across the board of academic disciplines. For example, lawyers refer to contestation to depict the practice of weighing arguments in the process of jurisprudence. In turn, social scientists refer to contestation to indicate the struggle of social forces over power in the 19th and 20th centuries. And critical theorists, contestation involves active engagement with public debate about philosophical assumptions.”³²

Dalam hal ini kontestasi memiliki tujuan yang berbeda tergantung dari lingkungan yang menjadi lokus dari terjadinya perdebatan. Bila dikaitkan dengan budaya, kontestasi merupakan ekspresi dari identitas kelompok tertentu yang menunjukkan karakteristik dari pemaknaan mereka terhadap hal diluarnya. Ekspresi kultural memungkinkan adanya konflik dengan dominasi wacana tertentu.

Kongres Kebudayaan merupakan medium yang menunjukkan kontestasi pada level makro yang bersifat formal. Bahasa yang dominan digunakan oleh kalangan elite pemerintah mendapatkan banyak pertentangan dari para tokoh seniman, budayawan, ilmuwan, dan lain sebagainya. Kontestasi juga merupakan perdebatan untuk memberikan dukungan dan penolakan atas suatu isu yang memiliki dampak yang cukup

³² *Ibid*, hlm 8.

besar bagi kehidupan masyarakat, seperti yang tercermin dalam peristiwa Kongres Kebudayaan.

1.6.3 Kongres Kebudayaan

Istilah kongres adalah sesuatu bentuk pertemuan yang dilihat dalam tujuan politis. Dalam Ensiklopedi Indonesia F - M, kongres didefinisikan *pertama*, rapat yang diselenggarakan oleh suatu partai dan dihadiri oleh wakil-wakil dari semua cabang partai tersebut. Kongres biasanya dilakukan sekali setahun untuk menentukan garis besar aktivitas partai. *Kedua*, Pertemuan antar wakil berbagai negara. Biasanya lebih penting daripada konferensi biasa.³³

Bila dikaitkan dengan konteks kebudayaan, maka definisi mengenai Kongres Kebudayaan dapat dimengerti sebagai ajang pertemuan yang digagas oleh negara atau lembaga lain dalam mengatasi suatu problem dalam masyarakat terkait kebutuhan dalam aktivitas kultural masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Nunus Supardi dalam bukunya *Kongres Kebudayaan 1918 – 2003* (2007), Ia menjelaskan bahwa Kongres kebudayaan merupakan sebuah peristiwa historis yang didalamnya memuat berbagai momentum yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran

³³ Dikutip dari artikel yang ditulis Bambang Sulisty, S.Pd., .M.Eng dengan judul *Teknik dan Etika Diskusi Ilmiah*, 2010, Hlm. 5. diakses melalui laman <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Bambang%20Sulistyo,%20S.Pd.,%20M.Eng./BS-20100426%20-%20Makalah%20Teknik%20&%20Etika%20Diskusi%20Ilmiah.pdf> pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 19.33 WIB

dalam mengenal dan memahami kebudayaan termasuk perdebatan yang pernah terjadi dalam konteks kultural di Indonesia.

Forum kongres menjadi ajang yang sangat tepat karena di sana bertemu para budayawan, seniman, cendekiawan, wartawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dari berbagai daerah untuk bersama – sama memperbincangkan kebudayaan.³⁴ Pelaksanaan kongres kebudayaan merupakan upaya untuk menetapkan beberapa kesepakatan terkait persoalan kebudayaan baik yang bersifat nasional ataupun daerah dengan melihat ragam konteks sosial politik yang terjadi.

1.6.4 Teks Sebagai Bentuk Kebudayaan

Dalam kajian *cultural studies*, kebudayaan dapat diartikulasikan kedalam berbagai macam bentuk material. Hal ini didasari dengan anggapan bahwa pada dasarnya kebudayaan adalah segala aktivitas yang hidup, berkembang, dan berubah dalam kehidupan sosial masyarakat. Keragaman dari berbagai kelompok sosial dalam masyarakat termasuk identitas dan kelas sosialnya, mengakibatkan munculnya interpretasi dan makna akan wacana atau praktik kebudayaan itu sendiri. Sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana makna atas suatu bentuk kebudayaan dapat dimengerti, dalam *cultural studies* dikenal suatu kajian yaitu analisis kebudayaan dalam teks.

³⁴ Nunus Surpadi, *Op.cit*, hlm 4.

Teks dalam pemahaman *cultural studies* tidak dibatasi dan terbatas hanya pada bentuknya yang tertulis seperti buku, puisi, novel, atau jenis lain yang serupa. Namun, dalam perspektif *cultural studies* yang berkembang atas kritiknya terhadap strukturalisme, teks dapat diartikan kedalam berbagai macam bentuk dengan beberapa pendefinisian ulang yang dibuatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Nick Couldry dalam buku *Inside Culture: Re-imagining the Method of Cultural Studies* (2000), mengatakan bahwa yang terutama dalam memahami teks adalah memadukan sekaligus mengaitkan berbagai unit analisis dalam bidang tekstual (sosiologi, politik, ekonomi, dan sejarah) itu sendiri. Ia mendefinisikan teks seperti dalam kutipan berikut:

“This is what I mean by the term ‘text’; and, as a working definition we can call a ‘text’ a complex of interrelated meanings which its readers tend to interpret as a discrete, unified whole.”³⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa memahami teks akan berkaitan dengan bagaimana upaya menafsirkan kompleksitas makna yang terkandung didalamnya, yang mana juga berkaitan dengan posisi pembaca sebagai subjek yang memiliki otonomi untuk memahami teks tersebut. Maka, teks dapat dipahami bentuk – bentuk lainnya seperti film, pakaian, berita koran, atau bahkan tayangan televisi.

³⁵ Nick Couldry, *Inside Culture: Re-imagining the Method of Cultural Studies*, (London: SAGE Publications), 2000, hlm 70. Diakses melalui laman <http://fib.unair.ac.id/ebooksclub.org> pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 23.11 WIB.

Melihat berbagai macam bentuk kebudayaan kedalam pengertian teks, sebenarnya berangkat dari memahaminya sebagai sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam membahas kebudayaan sebagai teks, perspektif *cultural studies* memadukan pendekatannya dengan hermeneutika. Pada dasarnya teks yang dipahami dalam pengertian hermeneutika berbeda dengan pemahaman semiotika, Paul Ricoeur menjelaskan hal tersebut sebagai berikut;

“For semiotic theory the only operative concept is that of the literary text. Hermeneutics, however, is concerned with reconstructing the entire arc of operations by which practical experience provides itself with works, authors and readers.”³⁶

Cultural studies dengan hermeneutika melihat bahwa pada dasarnya ada tiga hal penting yang perlu dipahami untuk menganalisa suatu teks, yaitu teks itu sendiri, penulis, dan pembaca. Formulasi tersebut dijelaskan dalam sebuah proses produksi budaya yang dalam kajian *cultural studies* disebut dengan *cultural circuit*. Dalam *cultural circuit* dijelaskan bagaimana proses simultan dari keberadaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Proses tersebut dimulai dari konteks kehidupan sehari – hari (*everyday life*), produksi (*production*), teks (*text*), dan pembaca (*readers*).³⁷

Keempat elemen tersebut yang sangat penting untuk diperhatikan untuk

³⁶ Richard Johnson, dkk, *The Practice of Cultural Studies*, (London: SAGE Publications), 2004, hlm 38. Diakses melalui laman <https://epdf.tips/the-practice-of-cultural-studies.html> pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 21.29 WIB.

³⁷ *Ibid.*

memahami bagaimana suatu bentuk kebudayaan dapat berkembang dan bertransformasi dalam kehidupan masyarakat.

1.6.5 Kebudayaan dan Pembangunan

Pemikiran – pemikiran ekonomi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an menemukan bahwa pembangunan tidak hanya didorong oleh hadirnya institusi-institusi formal namun juga oleh hadirnya institusi-institusi informal yang mana budaya hadir dan berperan di dalamnya.³⁸ Prospek dalam agenda pembangunan sangat memperhatikan kondisi kebudayaan yang berkembang melalui berbagai lembaga yang turut aktif memproduksi dan mereproduksinya, namun disatu sisi dalam konteks relasinya dengan pembangunan, kebudayaan seringkali disederhanakan kedalam berbagai kebijakan dan strategi yang abstrak bahkan tidak inklusif.

Hubungan antara budaya dan pembangunan bisa diartikan menjadi dua, baik sebagai agen perubahan utama maupun sebagai target perubahan. Budaya dijadikan sebagai agen perubahan utama disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya *pertama*, budaya memproduksi kondisi material karena budaya memproduksi simbol dan aksi; dan *kedua*, budaya mampu mendorong individu untuk merekonstruksi struktur institusi dan

³⁸ Citra Hennida, dkk, *Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China*, Jurnal Globalisasi dan Strategis, No.2, (Surabaya: Universitas Airlangga). 2010, hlm. 250. Dikutip dari laman <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs8c18416addfull.pdf> pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 17.07 WIB.

lingkungan materialnya, dalam hal ini individu menunjukkan respon kreatifnya.

Dalam implementasinya relasi antara kebudayaan dan pembangunan tidak hanya memberikan dampak positif, perlu dipahami bahwa konotasi yang hadir melihat kedua aspek tersebut kadang lebih mengarah pada kepentingan politis apalagi dengan dominannya kekuatan negara dalam mengklaim berbagai diskursus terkait kebudayaan. Dari penjelasan mengenai proses budaya dalam pembangunan terkhusus yang ada di dalam masyarakat sekitar dapat kita amati bahwa kondisi diatas terjadi juga dilingkungan proyek investasi diseluruh indonesia. Bahkan lebih tragis, karena sejak alokasi lahan untuk industri atau bangunan, pembebasan tanah dan penggusuran penduduk, terjadi ketegangan antar masyarakat lokal dengan investor dan pemerintah.³⁹

Pada akhirnya, kita melihat relasi kebudayaan dan pembangunan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan atau dirumuskan oleh kalangan elite negara. Hal ini terjadi dalam berbagai wacana pembangunan saat ini, pereduksian gagasan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai macam problema baru, diskusi – diskusi dalam

³⁹ Melina, *Peranan Budaya Dalam Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” VOL. 2. NO. 4, (Siborongborong: Universitas Tapanuli Utara), 2016, hlm 129. Dikutip dari laman <http://www.Jurnalmudiraindure.Com/Wp-Content/Uploads/2017/04/Peranan-Budaya-Dalam-Pembangunan-Manusia-Indonesia.pdf> pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 19.12 WIB.

term kebudayaan dan penelitian akan kebudayaan hanya mengantarkan pada kepentingan elitis semata.

Kebijakan dan strategi kebudayaan adalah alat yang digunakan dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan yang berlaku. Keduanya merupakan bagian yang terintegrasikan dengan aspek politik, sebab muatan perumusan didalamnya adalah hasil dari *power* negara yang menetapkannya sebagai sebuah peraturan. Dalam tesisnya yang berjudul, “*Culture and Cultural Policy in a Globalized Context: The Case of Indonesia*”, Aulia Dwi Nastiti, mengatakan bahwa:

“Cultural policy, at a glance, could be understood as the area of public policy that governs activities related to the arts and culture. Many of the activities that now compose cultural policy have often been governed under the title of “arts policy.” Throughout the twentieth century, cultural policy is most usually considered as the entire realm of a government’s activities “with respect to the arts (including the profit-oriented cultural industry), the humanities and the heritages”. As a practical matter, cultural policy concerns governmental strategies that promote “the production, dissemination, marketing, and consumption of the arts” by a public.”⁴⁰

Kebijakan kebudayaan merupakan aktivitas politis yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perhatiannya menanggapi berbagai problema dalam bidang kultural yang terjadi. Sedangkan, strategi kebudayaan adalah serangkaian cara yang membantu untuk berjalannya setiap kebijakan yang telah dibuat agar berjalan sesuai keinginan. Strategi berasal dari kata *stratus* yang berarti pasukan dan kata *agein* yang berarti memimpin,

⁴⁰ Aulia Dwi Nastiti, Tesis: “*Culture and Cultural Policy in a Globalized Context: The Case of Indonesia*”, Université Jean Moulin – Lyon 3: Faculté des Langues, 2014, hlm 30. Diakses dari laman https://www.academia.edu/23544824/_Culture_and_Cultural_Policy_in_a_Globalized_Context_The_Case_of_Indonesia_ pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 21.14 WIB.

sehingga strategi berarti memimpin pasukan. Sehingga strategi kebudayaan mengandung pengertian bagaimana cara atau usaha merencanakan dapat diwujudkan atau juga dikatakan sebagai sebuah gerakan kebudayaan dari berbagai produk budaya.⁴¹

Ada dua perspektif yang menjelaskan dan coba menganalisa mengenai kebijakan kebudayaan yang berlaku saat ini yaitu, melalui perspektif *cultural studies* dan *political studies*. Dalam perspektif *cultural Studies*, kebijakan kebudayaan dijelaskan sebagai berikut;

“From the cultural studies perspective, Miller and Yudice (2002) identify a conception of cultural policy that regards public involvement in the cultural domain through the prism of “governmentality.” That is the process by which the state comes to manage individuals (Foucault 1991, 87-90). In this sense, cultural policy is a form of “hegemony” that is secured when “the dominant culture uses education, philosophy, religion, aesthetics, and art to make its dominance appear normal and natural to the heterogeneous groups that constitute society”.⁴²

Perspektif *cultural studies* memposisikan kebijakan kebudayaan sebagai diskursus yang perlu dikritisi, melihat bahwa kenyataannya kebijakan kebudayaan adalah bentuk hegemoni dari kekuasaan negara untuk mentransferkan budaya/ideologi dominan yang berkembang ke setiap lembaga dan aspek kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah diskursus kebijakan budaya tidak bisa hanya dianalisa berdasarkan satu aspek tertentu namun perlu dikaji dari elemen – elemen yang terlibat didalamnya, seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut:

⁴¹ Dikutip dari laman <https://www.ngopibareng.id/nonotsukrasmono/article/strategi-kebudayaan> pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 21.48 WIB.

⁴² Aulia Dwi Nastiti, *Op.cit*, hlm 31.

“Departing from this approach, Jones (2012 : 2) further argues that cultural policy research should not be limited to the policy-making process. Instead, it “should track the relationships among narrowly defined cultural policies established by the state, the practices of practitioners and audiences, the ambitions of policy makers to influence characteristics and behaviors.”⁴³

Kebijakan kebudayaan yang berlangsung saat ini lebih diarahkan pada posisi negara melalui lembaga yang ditugaskan mengurus bidang kebudayaan untuk secara aktif melakukan berbagai penerapan kebijakan dan menampung aspirasi dari elemen lainnya. Dalam konteks Indonesia, model kebijakan kebudayaan yang diterapkan dan dibuktikan dalam beberapa periode sejarah Indonesia adalah kebijakan budaya otoritarian. Alat keberbudayaan pertama bagi Indonesia adalah kebijakan budaya otoritarian, atau kebijakan budaya yang dirumuskan dengan asumsi bahwa mayoritas subjek suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk menghayati kewarganegaraan yang bertanggung jawab, dan membutuhkan bimbingan negara dalam pilihan budaya mereka.

Kebijakan kebudayaan di Indonesia adalah bentuk pertautan dan hubungan kompleks dengan berbagai bentuk pemerintahan yang pernah mengukuhkan dirinya sepanjang sejarah negara ini. Dilain sisi, keberadaan organisasi non-pemerintahan juga memiliki andil dalam mempengaruhi kebijakan kebudayaan dan makna kebudayaan, inilah yang disebut dengan *culturality* (keberbudayaan). Dikatakan dengan kurang formal, keberbudayaan adalah cara yang dibentuk secara historis yang bahwa orang

⁴³ *Ibid*, hlm 32.

berpikir dan berbicara tentang kebudayaan pada saat tertentu dan implikasinya bagi perilaku, afiliasi, dan identitas mereka dan orang lain. Sementara negara dan lembaga lainnya penting dalam mengatur sejumlah bidang yang mempengaruhi keberbudayaan, tidak semuanya berkekuasaan kuat, karena mereka tidak dapat menentukan semua elemen dan wacana, atau bagaimana mereka berinteraksi.⁴⁴

1.7 Kerangka Teoritis

1.7.1 Sosiologi Kebudayaan Menurut Raymond Williams

Raymond Williams merupakan salah seorang tokoh *cultural studies* yang mengembangkan pemikirannya dalam upaya melakukan rekonstruksi atas teori budaya Marxis. Williams memberikan alternatif baru dalam kajian budaya dengan secara aktif mengeksplorasi berbagai aspek material dalam masyarakat yang menjadi elemen dasar dalam budaya. Terkait dengan sosiologi kebudayaan, Williams juga meletakkan landasan epistemologisnya dalam kerangka Marxisme namun bukan dalam pandangan yang deterministik dan ortodoks. Dalam buku *Marxism and Literature* (1977) dijelaskan seperti berikut:

“Over and above their empirical results, these analyses force theoretical revision of the formula of base and superstructure and of the definition of productive forces. In a social area in which large-scale capitalist economic activity and cultural production are now inseparable. Unless this theoretical revision is made, even the best work of the radical and anti-capitalist empiricists is in the end overlaid or absorbed by the specific theoretical structures of bourgeois cultural sociology.”⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm 26.

⁴⁵ Raymond Williams, *Marxism and Literature*, (New York: Oxford University Press), 1977, hlm 210.

Sejalan dengan pemikiran Marxisme bahwa kekuatan produksi di era kapitalisme ini menandai bahwa harus ada perhatian dan kajian lebih komprehensif dalam melihat posisi budaya, tidak hanya sebagai suprastuktur, namun juga pada saat yang sama bisa menjadi landasan dalam kekuatan produksi. Sosiologi kebudayaan dalam pemikirannya adalah segala observasi dan analisis dalam mengajukan pertanyaan baru dalam lingkup kultural tidak sebatas hanya pada deskripsi mengenai suatu peristiwa. Sosiologi kebudayaan dalam perspektif Raymond Williams bertujuan untuk;

“A modern sociology of culture, whether in its internal studies or in its interventions in a more general sociology, is concerned above all to enquire, actively, and openly, into these received and presumed relations. As such it is not reworking its own field, but putting new questions and new evidence into general work of the social sciences.”⁴⁶

Setelah memahami bagaimana kerangka berpikir dan landasan epistemologis dalam sosiologi kebudayaan menurut perspektif Raymond Williams, ada beberapa teori yang dibuatnya untuk membantu dalam menjelaskan proses produksi dan reproduksi kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Materialisme Kultural, teori yang merupakan hasil pembaharuan Williams dalam metafor basis dan suprastruktur (Materialisme Historis) yang dikembangkan Karl Marx. Materialisme Kultural adalah;

⁴⁶ Raymond Williams, *The Sociology of Culture*, (USA: The University of Chicago), 1995, hlm 10.

“In each part, while presenting analysis and discussion of key elements and variants of Marxist thinking, I am concerned also to develop a position which, as a matter of theory, I have arrived at over the years. This differs, at several key points, from what is most widely known as Marxist theory and even from many of its variants. It is a position which can briefly described as cultural materialism: a theory of the specificities of material cultural and literary production within historical materialism. Its details belong to the argument as a whole, but I must say, at this point, that it is, in my view, a Marxist theory, and indeed that in its specific fields it is, in spite of and even because of the relative unfamiliarity of some or its elements, part of what I at least see as the central thinking of Marxism.”⁴⁷

Hal ini memberikan penguatan kembali bahwa kerangka teoritis dari pemikiran Raymond Williams merupakan pertautan dalam Materialisme Historis dan teori budaya yang dikembangkannya. Pendekatan historis dalam penjelasannya menandai ada keselarasan dan hubungan secara implisit dalam struktur masyarakat dan pengalaman yang dimiliki individu.

Secara sosiologis, budaya atau kebudayaan merupakan aktivitas individu dan masyarakat yang secara konstruktif dan aktif selalu dikembangkan dalam berbagai periode sejarah. Raymond Williams secara khusus membahas institusi, formasi, dan alat produksi dalam masyarakat untuk melihat kaitannya dengan produksi kebudayaan. Ketiga elemen ini menjadi dasar untuk melakukan produksi kebudayaan, karena melihat sifatnya yang dinamis dan merupakan hasil dari pikiran dan kerja manusia.

Menurut Williams, produksi kebudayaan adalah sebagai berikut;

“Any adequate sociology of culture must, it seems, be an historical sociology. When we look at the vast evidence of the relations of cultural production, in so many different societies and historical periods, it is clear that it would be unwise

⁴⁷ Raymond Williams, 1977, *Opcit*, hlm 5.

to adopt, as our first theoretical construct, some universal or general explanatory scheme of the necessary relations between “culture” and “society”⁴⁸

Masyarakat dan budaya adalah titik analisa produksi kebudayaan, hal ini disebabkan karena memang pada dasarnya bahwa segala bentuk proses material merupakan produk dari budaya dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tiga elemen dalam produksi kebudayaan seperti yang telah dijelaskan diatas. *Pertama*, institusi, merupakan produk yang dibuat oleh masyarakat dalam upayanya mengatur berbagai hubungan dan nilai serta norma dalam kehidupan sehari-hari.

Relasi institusi dengan agen atau individu atau dengan institusi lain dalam masyarakat merupakan bagian yang aktif dan integral dalam membangun berbagai produk kebudayaan. Raymond Williams mencontohkannya dalam melihat hubungan antara pasar, seniman profesional dan negara dalam proses produksi kebudayaan. Seperti dalam kutipan berikut;

“Much actual sociology of culture presumes, in a way inevitably, the typical or dominant relations of the period with which it is concerned; it goes on to adduce detailed evidence of these. But it can that happen that these relations become a norm, from which other periods are interpreted or even, by contrast, judged. The cultural relations of the ‘market’ are contrasted with the ‘patron’, or the situation of the ‘professional artist’ with that of the ‘state producer’. The important concept of the patron, for example, covers (and then often obscures) at least four or five distinct social relationship in cultural production.”⁴⁹

Sosiologi kebudayaan pada pembahasan mengenai institusi merupakan perpaduan dalam melihat aspek historis dan perbedaan dalam

⁴⁸ Raymond Williams, 1995, *Opcit*, hlm 33.

⁴⁹ *Ibid.*

setiap keberadaan institusi dalam masyarakat. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan analisis dari relasi antara institusi dan klasifikasi kerjanya dalam masyarakat.

Kedua, formasi, secara spesifik Williams melihat formasi dengan melihat kaitan antara organisasi yang ada dalam masyarakat yang tidak hanya mengatur relasi hubungan seperti pada institusi tetapi perlu juga melihat dari tindakan tersebut lahir dan berkembang dalam individu. Hal ini merupakan dasar dalam melihat bagaimana hubungan individu dengan aturan umum dalam masyarakatnya. Williams menjelaskan sebagai berikut;

“We have already noticed some early example of this, in such case as the internal organization of the bardic orders, which were concerned not only with social positions and relations, but with the practice (at several stage, the rules) of the art itself. There is a direct relation, of course, between this strict form of internal organization and the integration of its order within the general social order. Significant breaks from the rules, or the opposite cases of their increasing formalization and rigidity, can often be related to periods of change or crisis in this general relationship.”⁵⁰

Formasi sosial dalam bentuk berbagai tipe organisasi merupakan proses dari transisi dan irisan dalam sejarah masyarakat yang cukup kompleks. Setiap kelompok atau individu dalam formasi sosial tertentu atau menjadi bagian dari organisasi sosial tertentu akan membangun relasi dengan berbagai aspek yang lebih makro. Dengan melihat beragam perbedaan dalam formasi masyarakat khususnya dalam hal kultural kita

⁵⁰ *Ibid*, hlm 57.

akan mampu memahami bahwa pada dasarnya hal ini berimplikasi akan beragamnya bentuk kebudayaan.

Ketiga, mode produksi, dalam melihat bagaimana produksi kebudayaan dapat dilakukan adalah melalui pengamatan akan sistem dan sarana produksi yang ada dalam masyarakat. Pada bagian ini Williams menjelaskan bahwa sumber daya material dalam masyarakat (alam) memiliki relasi yang kuat dengan bentuk sosial masyarakat (ideologi) yang membentuk atau mentransformasikannya kedalam produk kebudayaan.

Williams menjelaskan sebagai berikut;

“It is often said, persuasively, that men entered into social relations in the course of using or transforming the non-human material world. But this should never carry the implication that no social relations were entered into in the course of using and developing inherent and constituted physical resources. Yet because social relations, and especially changes in social relations, are more evident in cases of developments in the use or transformation of non-human material object and forces, it is worth emphasizing the manifest social character of other kind of development”⁵¹

Namun disatu sisi, hal ini menjadi sangat kompleks ketika melihat relasi produksi kebudayaan saat ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem dan kebijakan produksi yang didominasi oleh kontrol negara dan pasar. Ini menjadi semakin kompleksnya pemahaman kita bahwa produksi kebudayaan dalam bentuk baru yang masif juga berkaitan dengan sarana material dalam kebudayaan dimaknai oleh setiap bagian masyarakat.

⁵¹ *Ibid*, hlm 88.

Selanjutnya mengenai reproduksi kebudayaan, istilah reproduksi secara umum mungkin diartikan sebagai upaya melakukan penciptaan kembali sesuatu hal atau bentuk tertentu. Namun dilain sisi Williams menjelaskan bahwa reproduksi pada satu sisi memiliki distorsi atau perbedaan dalam makna dan hubungan bila dikaitkan dengan proses kebudayaan. Williams menjelaskan bahwa;

‘What is true of ‘a culture’, at its most general level – that it is never a form in which people happen to be living, at some isolated moment, but a selection and organization, of past and present, necessarily providing for its own kinds of continuity – is true also, at different levels, many of the elements of cultural process. A tradition is the process of reproduction in action. Thus many of the key elements of cultural process are brought together by this concept. But then it is also apparent, even in these early definitions, that ‘reproduction’ has different levels of meaning and bearing. Indeed, if it is too simply and hastily used, it can overlay rather than clarify the actual process’⁵²

Williams melihat bahwa sarana reproduksi kebudayaan yang dapat diamati dalam masyarakat adalah pendidikan dan tradisi. Pendidikan setelah menjadi pusat dari pengembangan pengetahuan dan telah menjadi lokus utama dalam mentransferkan berbagai tindakan serta nilai dalam masyarakat akhirnya menjadi kunci dalam melakukan reproduksi kebudayaan. Williams melihat kehadiran kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan poin utama dalam melihat hubungan dengan reproduksi kebudayaan, menurut Williams;

“These can be seen in the disposition of curriculum, in the modes of selections of those who are to be educated and in what ways, and in definitions of educational authority. It is then reasonable, at one level, to speak of general educational process as a key form of cultural reproduction, which can be linked with that more general reproduction of existing social relations which is assured by existing and self-

⁵² *Ibid*, hlm 184.

prolonging property and other economic relations, institutions of state and other political power, religious and family forms.”⁵³

Selanjutnya adalah sarana kedua yang digunakan untuk melakukan reproduksi kebudayaan adalah tradisi. Tradisi secara umum dapat dimengerti sebagai pola tindakan yang dilakukan secara terus menerus dalam setiap generasi menandai pentingnya hal tersebut bagi eksistensi kelompok masyarakat. Menurut Raymond Williams, tradisi adalah;

“For tradition (‘our cultural heritage’) is self-evidently a process of deliberate continuity, yet any tradition can be shown, by analysis, to be a selection and reselection of those significant received and recovered elements of the past which represent not a necessary but a *desired* continuity. It is important to emphasize, in each case, that this ‘desire’ is not abstract but is effectively defined by existing general social relations”⁵⁴

Williams melihat bahwa tradisi tidak hanya menjadi pengulangan tindakan dari apa yang ada di masa lalu, lebih dari itu merupakan proses seleksi dan pemilihan ulang berbagai signifikasi yang ada sebagai bentuk material dari hubungan sosial masyarakat. Hubungan antara konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian akan diuraikan dalam bentuk skema dibawah ini;

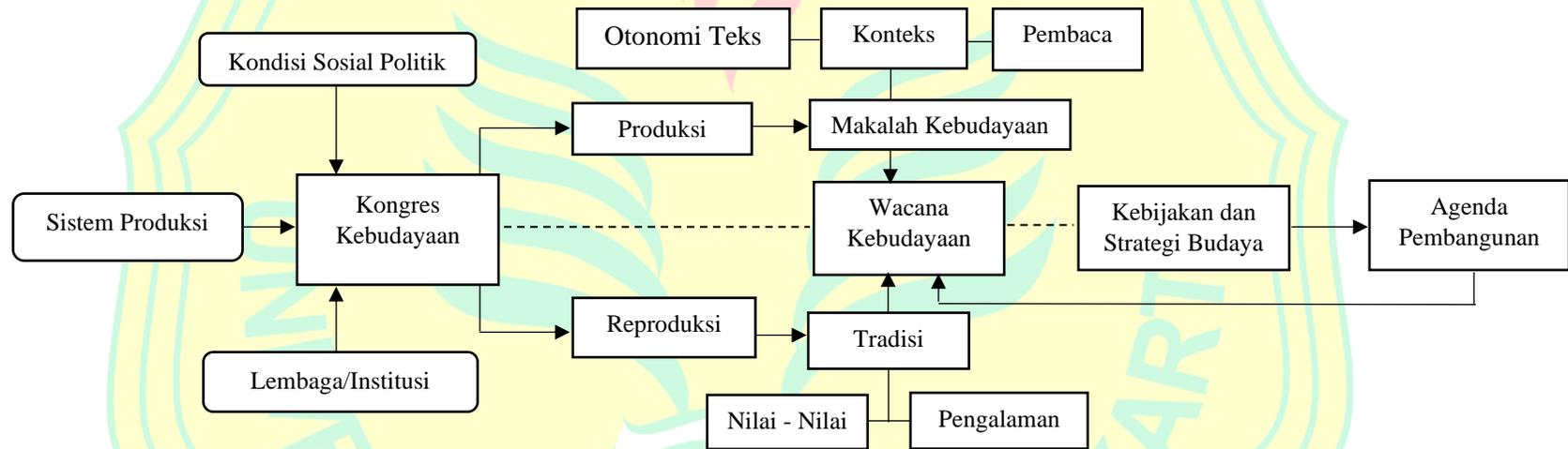
⁵³ *Ibid*, hlm 186.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 187.

1.7.2 Pemetaan Konsep dan Teori

Skema 1.1

Skema Pemetaan Konsep dan Teori



Sumber: Interpretasi Peneliti, 2019.

Setelah menjabarkan satu persatu kerangka konsep dan kerangka teoritik yang akan peneliti jadikan acuan untuk menganalisis penelitian ini, kemudian peneliti mencoba menghubungkannya agar tergambar bagaimana masing-masing konsep dan teori yang sudah dijelaskan tadi saling berkesinambungan. Hubungan ini terdiri dari pandangan peneliti dari berbagai literatur yang digunakan untuk memperkuat analisa dan pemikiran baru yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Hubungan konsep dan teori yang digunakan tergambar dalam skema diatas.

Penjelasan dalam skema penelitian tersebut dimulai dari keberadaan Kongres Kebudayaan di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sistem produksi dalam masyarakat, kondisi sosial politik, dan lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kongres. Ketiga hal tersebut bergerak secara dinamis, dan pada catatan sejarah pelaksanaan Kongres Kebudayaan di Indonesia memberikan implikasi terhadap substansi dan teknis didalam kongres. Berkesinambungan dengan itu, dalam pelaksanaan kongres sendiri ada dua proses yang terjadi, yaitu produksi dan reproduksi atas wacana kebudayaan Indonesia.

Dalam proses produksi, manifestasi yang dapat diamati dan dianalisa adalah makalah – makalah kebudayaan yang ditulis oleh para tokoh dan saran atau rekomendasi dari tukar pendapat para peserta kongres. Merujuk pada perspektif *cultural studies*, makalah – makalah kebudayaan itu

dijelaskan dalam pengertian teks. Teks yang diproduksi dalam kongres adalah hasil interpretasi dari penulis (otonomi teks), situasi sosial dan kultural (konteks), dan terakhir pemaknaan pembaca. Dilain hal terjadi juga proses reproduksi yang dilihat berdasarkan nilai – nilai dan pengalaman historis yang merupakan titik penghubung dalam setiap pelaksanaan kongres.

Kedua proses tersebut berujung pada pembentukan wacana kebudayaan Indonesia yang dalam hal ini banyak dipengaruhi oleh kebutuhan politis struktur kekuasaan terkait pembangunan masyarakat. Untuk melakukan pengamatan lebih mendalam terkait relasi antara pelaksanaan kongres dengan agenda yang dirancang oleh struktur kekuasaan, dapat dilihat dari kebijakan dan strategi kebudayaan yang dirumuskan. Implementasi atau tindaklanjut dari rumusan yang dihasilkan dalam kongres bisa menjadi tolak ukur melihat sejauh mana objektivitas struktur kekuasaan dalam perkembangan kebudayaan Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena memiliki beberapa keunggulan bila digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, pendekatan kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan realitas. *Kedua*, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan objek penelitian. *Ketiga*, pendekatan ini mampu menggali data lebih dalam karena dapat dianalisa secara deskriptif ditambah dengan referensi lain dari literatur yang didapatkan.

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.⁵⁵ Dengan memanfaatkan berbagai literatur sesuai dengan tema penelitian diharapkan akan mempermudah proses pengumpulan data dan temuan yang akan didapatkan.

Penelitian ini juga akan didukung dengan pendekatan historis, pendekatan historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu. Hasil dari penelitian historis dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Pendekatan historis lebih memusatkan pada data masa lalu berupa peninggalan atau artefak,

⁵⁵ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005, hlm 63.

dokumen, arsip, dan tempat-tempat yang dianggap keramat.⁵⁶ Dalam pendekatan historis terdapat beberapa tahapan untuk membantu proses pengumpulan data.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah teks makalah kebudayaan dari Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 1991. Dari delapan puluh sembilan teks yang ada, peneliti memilih sebelas teks sebagai subjek utama yang akan diteliti. Kesebelas teks tersebut diambil dari lima buku yang menjadi sub tema pembahasan kongres. Subjek penelitian juga didukung oleh referensi lain yang terkait seperti dalam jurnal, buku, surat kabar, koran, dan majalah yang terbit disekitar tahun 1991.

1.8.3 Peran Peneliti

Peneliti bersifat sebagai instrumen kunci penelitian, dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari proses observasi, analisis dan dokumentasi pada subjek penelitian dan mengaitkannya dengan konsep dan teori yang digunakan. Peneliti juga berusaha untuk memahami dan menjelaskan pesan, makna, dan ideologi yang terdapat pada teks baik secara tekstual maupun kontekstual.

⁵⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya), 1995, hlm 89.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dapat mendukung data subjek penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah tinjauan literatur, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan majalah yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk membantu proses pengumpulan data. Untuk memudahkan pengumpulan data sendiri dalam pendekatan historis ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah heuristik, pengumpulan sumber-sumber data primer dan sekunder, sumber primer dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan tahun 1991 dan berbagai makalah yang dijadikan gagasan atau pandangan mengenai kebudayaan dan bahan diskusi dalam bentuk bunga rampai yang terbagi menjadi lima jilid sesuai dengan sub tema Kongres Kebudayaan tahun 1991.

Sumber sekunder adalah buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, seperti yang dimuat dalam surat kabar Pikiran Rakyat, Harian Jawa Post, dan Suara Pembaharuan. Tahapan kedua adalah kritik sumber, dalam tahapan ini peneliti melakukan proses kritik terhadap sumber – sumber data untuk mendapatkan penilaian yang objektif dalam melihat substansi dari literatur terkait dan memilih

literatur mana saja yang sekiranya sesuai untuk dapat digunakan dengan penelitian. Tahapan ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, dalam tahapan ini peneliti mencoba menghindari subjektivitas dan berusaha objektif terhadap fakta – fakta yang terdapat dalam sumber data penelitian. Tahapan yang terakhir adalah histiografi, dalam tahapan ini peneliti mencoba untuk merekonstruksi ulang kronologis dari peristiwa sejarah Kongres Kebudayaan khususnya ditahun 1991 dan memberikan penjelasan baru terkait pelaksanaannya yang berhubungan dengan perkembangan diskursus kebudayaan dalam masyarakat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik analisis teks. Analisis teks pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana. Menurut Lockyer, teks yang dimaksudkan tidak saja berupa narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara TV, naskah pidato, tetapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perabot rumah tangga, perkantoran, rumah makan dan sarana-sarana di ruang publik. Apa pun yang bisa ditafsir diperlakukan sebagai teks.⁵⁷

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, *Mengenal Ragam Studi Teks: Dari Content Analysis hingga Pos-modernisme (Bahan Kuliah Metodologi Pendidikan)*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2017. Diakses melalui laman <http://repository.uin-malang.ac.id/1105/1/mengenal-ragam-studi-teks.pdf> pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 21.42 WIB.

Untuk melakukan analisis mendalam dari teks – teks yang dijadikan objek dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif *cultural studies* sebagai alat bantu analisa. *Cultural Analysis of Text* akan digunakan untuk membandingkan isi teks yang disampaikan dalam bentuk makalah kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk melihat kaitan teks yang diproduksi dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam struktur masyarakat.

Setelah menjelaskan kontestasi pandangan para tokoh melalui makalah kebudayaan yang dipilih, peneliti akan menganalisa secara keseluruhan terkait pelaksanaan Kongres Kebudayaan Tahun 1991 dengan politik kebudayaan nasional. Analisa ini akan dititikberatkan kepada Teori Sosiologi Kebudayaan menurut Raymond Williams yang berfokus pada proses produksi dan reproduksi kebudayaan.

1.8.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan pemeriksaan kesahihan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.8.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Proses pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu Maret sampai dengan Agustus 2018, yang dilakukan di beberapa tempat seperti Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Jakarta Pusat, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Perpustakaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, dan tempat lain yang menyediakan akses terhadap data penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Penelitian skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan sistematika penulisan seperti berikut:

Bab I, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang penelitian. Peneliti menuliskan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengangkat tema tentang Peristiwa Kongres Kebudayaan dalam Perspektif Sosiologi Kebudayaan. Dalam latar belakang, peneliti memaparkan, bagaimana perdebatan diskursus kebudayaan dalam sejarah bangsa Indonesia dan bagaimana kelahiran Kongres Kebudayaan sebagai sebuah peristiwa kebudayaan yang perlu ditinjau dalam aspek sosiologis dan historisnya, kemudian dari pemaparan latar belakang ditarik permasalahan utama penelitian kedalam tiga pertanyaan penelitian.

Setelah itu dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti menjabarkan tujuan dari penelitian ini dibuat. Bab pertama ini juga terdapat tinjauan pustaka

atau tinjauan literatur sejenis yaitu penelitian yang sudah ada sebelumnya yang peneliti jadikan sebagai acuan dan bahan masukan dalam penelitian skripsi ini. Selanjutnya dalam bab pertama juga peneliti membuat kerangka konseptual dan kerangka teoritis sebagai acuan analisis. Setelah mendapatkan konsep – konsep terkait, peneliti membuat kerangka berpikir yang bisa dijadikan landasan dalam melakukan proses penelitian. Sub bab terakhir yang peneliti jabarkan disini adalah sistematika penelitian ini.

Bab II, dalam bab kedua ini peneliti menjabarkan proses terjadinya Kongres Kebudayaan di Indonesia khususnya pada tahun 1991. Dengan melihat konteks sosio – historis dapat digali berbagai fakta yang melatarbelakangi pelaksanaan Kongres Kebudayaan tersebut. Peristiwa Kongres Kebudayaan merupakan sebuah bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan diskursus kebudayaan dan menjadi ajang temu berbagai perwakilan masyarakat dan negara, maka dari itu dalam bab ini peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai dinamika pelaksanaan kongres dan kondisi sosial politik yang terjadi.

Bab III, dalam bab ketiga ini peneliti melakukan penjabaran dan analisis mengenai kontestasi gagasan kebudayaan dari para tokoh melalui makalah kebudayaan yang disampaikan dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991, juga memperhatikan hubungan pandangan kebudayaan dan agenda pembangunan pemerintahan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk merepresentasikan kemampuan berpikir dan daya nalar peneliti terhadap bahan bacaan, ataupun alur

berpikir terhadap objek penelitian, yang telah didapatkan didalam buku, jurnal, artikel, tesis, desertasi dan kajian ilmiah lainnya.

Bab IV, pada bab ini berisi analisis teoritik dan konsep yang telah diteliti dengan mengedepankan unsur nalar, juga mengkritisi perkembangan gagasan budaya dari peristiwa Kongres Kebudayaan tahun 1991 dengan mengacu pada perspektif sosiologi kebudayaan Raymond Williams untuk mengkaitkan dengan konteks penelitian.

Bab V, merupakan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga terdapat saran atau rekomendasi dari peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembahasan kongres kebudayaan.



